

Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Fanisah Yuliyanda¹, Abdul Nasser Hasibuan², Arti Damisa³

¹²³Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

¹²³Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733

E-mail: yuliyandafanisah@gmail.com¹, abdulnasserhasibuan@uinsyahada.ac.id², artidamisa@uinsyahada.ac.id³

ABSTRAK

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan sektor publik yang membantu urusan pemerintah dalam bidang sosial. Dalam penelitian ini, Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara lebih mengutamakan pengelolaan *input*, namun masih kurang memperhatikan *output* dan *outcome*. Sehingga dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan menggunakan *value for money*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, program perlindungan dan jaminan sosial, serta program rehabilitasi sosial tahun 2020-2021 diukur dari tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan data sekunder yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan data primer dengan menyebarkan angket. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan angket. Data kemudian dianalisis menggunakan *value for money* yang terdiri dari tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling incidental* dengan pengambilan jumlah sampel sebanyak 123 responden, dan diuji dengan validitas dan reliabilitas guna mengukur keandalan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money* pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, efisiensi, dan belum mencapai dengan efektivitas yang baik. Kemudian pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 tergolong efisiensi berimbang, sedangkan pada tahun 2021 tergolong efisiensi, namun pada tahun 2020-2021 belum mencapai efektivitas yang baik. Kemudian untuk program rehabilitasi sosial untuk tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 berjalan dengan efisiensi, namun pada tahun 2021 belum mencapai efisiensi dengan baik, dan tahun 2020 belum mencapai efektivitas yang baik, sedangkan pada tahun 2021 mencapai efektivitas berimbang.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis, Kinerja Keuangan, *Value For Money*

ABSTRACT

The North Padang Lawas Regency Social Service is a public sector that assists government affairs in the social sector. In this study, the North Padang Lawas District Social Service prioritized

input management, but paid little attention to output and outcome. So it is necessary to measure financial performance using value for money. The formulation of the problem in this study is how the financial performance of the North Padang Lawas Regency Social Service in social empowerment programs and handling the poor, social protection and security programs, and social rehabilitation programs in 2020-2021 is measured from the level of economy, efficiency and effectiveness. This study aims to find out how the financial performance of the North Padang Lawas Regency Social Service in social empowerment programs and handling the poor, social protection and security programs, and social rehabilitation programs in 2020-2021 is measured from the level of economy, efficiency and effectiveness.

This research uses descriptive quantitative method. Researchers used secondary data in the form of government agency performance accountability reports and primary data by distributing questionnaires. Data collection techniques are interviews, documentation, and questionnaires. The data is then analyzed using value for money which consists of three elements, namely economy, efficiency, and effectiveness. The sampling technique uses incidental sampling with a total sample of 123 respondents, and is tested for validity and reliability to measure the reliability of the data.

The results of this study indicate that measuring financial performance uses the concept of value for money in social empowerment programs and handling the poor in 2020-2021 in the category of economics, efficiency, and has not achieved good effectiveness. Then in the 2020-2021 social protection and security programs it will be included in the economic category, and in 2020 it will be classified as balanced efficiency, while in 2021 it will be classified as efficiency, but in 2020-2021 it has not achieved good effectiveness. Then for the social rehabilitation program for 2020-2021 it will be included in the economical category, and in 2020 it will run efficiently, but in 2021 it will not achieve good efficiency, and in 2020 it will not achieve good effectiveness, while in 2021 it will achieve balanced effectiveness.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Economical, Financial Performance, Value For Money

PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan organisasi yang kegiatannya menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan publik. Tujuan utama sektor publik adalah memberikan pelayanan dan menyediakan kebutuhan masyarakat, sedangkan tujuan finansial sektor publik yaitu memaksimalkan anggaran untuk kegiatan pelayanan publik (Mardiasmo, 2018). Kemampuan kinerja sektor publik dilihat dari penggunaan uang publik dalam membiayai kegiatan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja keuangan sangat penting untuk dibahas dalam sektor publik (Hamid dan Lamuda, 2019). Kinerja keuangan dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi pemerintah dan mewakili persetujuan semua golongan, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam

pembuatan laporan keuangan yang wajar, jelas, dan lengkap untuk menciptakan nilai transparansi (Hasibuan dkk., 2020).

Laporan keuangan harus dipenuhi, salah satunya dengan menyajikan laporan realisasi anggaran yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk akuntabilitas dari penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas suatu instansi (Mukarom dan Laksana, 2016). Kinerja keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perlu diukur, yaitu menggunakan *value for money*. Konsep *Value for money* merupakan pengelolaan dan pengukuran sektor publik yang mengutamakan tiga bagian utama penting, yaitu ekonomis dalam mengalokasikan sumber daya dengan baik, efisiensi dalam menghasilkan nilai guna dari penggunaan *input*, dan efektivitas dalam memberikan pelayanan berdasarkan sasaran dan tujuan. Konsep *value for money* merupakan konsep penting dan inti dari pengukuran kinerja sektor publik yang sistem pengukurannya dilakukan dengan informasi akuntansi dengan alat ukur yang bersifat *financial* dan *non-financial* (Halim dan Kusufi, 2013).

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan organisasi sektor publik yang membantu urusan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial. Program yang dibuat diharapkan bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun pada kenyataannya masih terdapat masalah sosial yang belum sepenuhnya dapat teratasi, yaitu peningkatan kemiskinan pada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 26.790 jiwa, kemudian terjadi peningkatan kemiskinan pada tahun 2021 yaitu mencapai 28.370 jiwa.

Apabila terjadi peningkatan biaya, harus diiringi dengan peningkatan manfaat yang lebih besar (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara anggaran pelaksanaan seluruh program yang dirasakan masyarakat secara langsung tahun 2020 yaitu Rp 1.000.820.500 dari anggaran yang tersedia, yaitu Rp 1.078.724.100. Sedangkan pada tahun 2021 untuk pelaksanaan program yang dirasakan masyarakat secara langsung sebesar Rp 886.425.100 dari anggaran yang tersedia, yaitu Rp 947.111.200.

Berdasarkan laporan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, kegiatan yang dilaksanakan dinas sosial harus sesuai dengan target capaian kinerja, yaitu mencapai 100%. Sehingga dinas sosial harus mampu dalam melaksanakan capaian kinerja tersebut. Capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mencapai 100%, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai target. Sedangkan pada program perlindungan dan jaminan sosial di tahun 2020 hanya mencapai 96%, dan pada tahun 2021 hanya mencapai 94%. Kemudian pada program rehabilitasi sosial tahun 2020 hanya mencapai 96%, dan tahun 2021 hanya mencapai 73%. Faktor penyebab beberapa kegiatan belum memenuhi target secara keseluruhan, dikarenakan beberapa keadaan yang kurang mendukung, seperti masih kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan serta kesalahan dalam memprediksi yang disebabkan karena tidak selamanya semua kegiatan dapat terprediksi sesuai target.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat penerima bantuan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu dengan Ibu Nurhamida mengatakan bahwa bantuan yang diberikan tidak memberikan dampak pada peningkatan maupun penurunan pendapatannya, dikarenakan bantuan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu, sedangkan bantuan yang diterima tidak menentu kapan datangnya. Penyebab pendapatan masyarakat penerima bantuan sosial tidak mengalami peningkatan, dikarenakan masyarakat belum bisa mengelola bantuan tersebut dengan baik. Menurut Bapak Ongku selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, mengatakan bahwa program yang dapat meningkatkan dunia usaha dan mempengaruhi pendapatan ada pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Namun kegiatan ini tidak diterapkan, karena anggaran yang diberikan belum mencukupi untuk menjalankan kegiatan ini.

Pengukuran dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam mengelola keuangan. Sehingga dilakukan pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money*. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara".

TINJAUAN TEORITIK

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan instansi dalam mengelola keuangan sesuai aturan yang baik dan benar. Dalam mencapai tujuan perlu melakukan analisis terhadap kinerja keuangan untuk mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan dalam perbaikan kinerja. Penilaian kualitas kinerja dapat dilihat dari penggunaan anggaran dalam laporan keuangan (Hutabarat, 2020).

Kinerja keuangan disajikan dalam laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang menggunakan anggaran. Penerapan kinerja keuangan yang bernilai transparan dan akuntabilitas diharapkan mampu mengurangi kebocoran dana, pemborosan, dan menemukan kegiatan yang tidak pantas dilakukan secara ekonomis (Ardila dan Putri, 2015). Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dalam menentukan imbalan penghargaan atau hukuman dari suatu kinerja (Mardiasmo, 2018).

Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut (Kasmir, 2018) terdapat beberapa manfaat pengukuran kinerja keuangan, diantaranya:

- 1) Mengetahui posisi keuangan dan hasil kinerja yang dicapai selama beberapa periode.
- 2) Mengetahui kekuatan dan kelemahan instansi dalam menjalankan kegiatan.
- 3) Digunakan sebagai pembandingan terhadap hasil yang telah dicapai.
- 4) Mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran dan tujuan.
- 5) Mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang.

Konsep *Value For Money*

Menurut (Mardiasmo, 2018) *value for money* adalah pengukuran kinerja sektor publik mengandung aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang saling berkaitan. *Value for money* mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang, dan setiap rupiah harus digunakan sebagaimana mestinya. Penerapan konsep *value for money* harus seimbang dengan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan, yaitu antara hasil dan proses (Halim dan Kusufi, 2013).

Setiap sektor publik diharapkan mampu mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan konsep *value for money*, yaitu ekonomis (hemat) dalam mengalokasikan sumber daya,

efisiensi (berdaya guna) dalam mencapai *output* yang maksimal dengan sumber daya yang minim, serta efektivitas (berhasil guna) dalam mencapai tujuan (Wuwungan, 2019).

Indikator *Value For Money*

Menurut (Halim dan Kusufi, 2013) dalam penerapan konsep *value for money* perlu diketahui mengenai beberapa bagian yang nantinya akan digunakan dan ditentukan dalam pengukuran, yaitu seperti *input* yang dinyatakan dalam bentuk nilai uang. Pengukuran *input* dilakukan dengan membandingkan *input* berupa kas dan *input* yang direalisasikan. Kemudian *Output* merupakan hasil langsung dari suatu proses yang dilaksanakan menggunakan *input*. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi kegiatan yang berbentuk barang atau jasa. Dan *Outcome* merupakan dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari suatu kegiatan. Pengukuran *outcome* digunakan untuk mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan.

Menurut (Mardiasmo, 2018) terdapat beberapa indikator *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan sektor publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ekonomis merupakan penggunaan *input* dengan kuantitas nilai uang yang layak dan tidak melakukan pemborosan dalam kegiatan.
- 2) Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* yang minim dalam menghasilkan *output* yang bernilai guna.
- 3) Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil kegiatan yang dicapai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, dan kegiatan yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan yang berisi penerapan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dalam merealisasikan anggaran dan kegiatan yang disampaikan secara sistematis (Mukarom dan Laksana, 2016).

Keberadaan LAKIP dijadikan sebagai sarana dalam mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah yang dikaitkan dengan anggaran dan proses pencapaian tujuan instansi pemerintah. Oleh karena itu, perlu dibuat analisis tentang pencapaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dalam melakukan perbaikan kinerja yang berkesinambungan (Beby Nurthesa Putri, 2019).

Standar Pelayanan Minimal

Menurut (Mukarom dan Laksana, 2016) standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu urusan pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar terhadap masyarakat secara minimal. Standar pelayanan minimal dijadikan sebagai pedoman dan bukti tanggung jawab untuk menjamin mutu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar sesuai dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan (Syafingi, 2017).

Pemerintah menjadikan standar pelayanan minimal sebagai pedoman dalam menentukan biaya yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik. Sedangkan bagi masyarakat berguna sebagai acuan dalam menilai pelayanan tersebut. Sehingga standar pelayanan minimal harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan publik (Riani, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Jalan Kota Pinang–Gunung Tua, Nomor 78, Simbolon, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, 22753. Adapun waktu penelitian yaitu bulan Desember 2021 sampai Juni 2022.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling incidental* dengan pengambilan jumlah sampel yaitu 123 responden. Peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan data primer yaitu angket. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan angket. Kemudian diuji untuk mengukur keandalan data dengan validitas dan reliabilitas. Data selanjutnya dianalisis menggunakan *value for money*, yaitu pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

TEKNIK ANALISIS DATA

Ekonomis

Suatu organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dibanding anggaran yang masuk, sehingga menghindari pemborosan. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan anggaran yang masuk dengan anggaran yang direalisasikan.

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{input value}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai kriteria penilaian yaitu:

- 1) Jika persentase nilai lebih besar dari 100 akan digolongkan tidak ekonomis.
- 2) Jika persentase nilai sama dengan 100 akan digolongkan ekonomis berimbang.

3) Jika persentase nilai kurang dari 100 akan digolongkan ekonomis.

Efisiensi

Efisiensi merupakan kaitan antara *input* yang dipakai untuk mencapai *output*. Maka apabila *output* atau nilai guna memiliki nilai yang tinggi dalam pemakaian *input* yang minim, maka akan meningkat juga tingkat efisiensinya.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai kriteria penilaian yaitu:

- 1) Jika persentase nilai lebih besar dari 100 maka akan digolongkan efisiensi.
- 2) Jika persentase nilai sama dengan 100 akan digolongkan efisiensi berimbang.
- 3) Jika persentase nilai kurang dari 100 maka akan digolongkan tidak efisiensi.

Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran untuk mengetahui sudah sejauh mana organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan. Apabila organisasi tersebut mampu mencapai sasaran dan tujuan, berarti organisasi tersebut sudah efektif.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan dapat diukur melalui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dinas sosial, yaitu melalui kuesioner. Kepuasan masyarakat bisa dilihat dengan memberikan skor pada jawaban kuesioner sesuai tingkat kepuasan yang dirasakan. Maka dibutuhkan perhitungan interval kepuasan, yaitu:

$$\text{IK maks} = R \times \text{PP} \times \text{EX maks}$$

$$\text{IK min} = R \times \text{PP} \times \text{EX min}$$

$$\text{Interval} = (\text{IK maks} - \text{IK min}) : \text{TS}$$

Keterangan:

IK maks = indeks kepuasan skor maksimal

IK min = indeks kepuasan skor minimal

PP = jumlah pernyataan

R = jumlah responden

EX maks = skor maksimal

EX min = skor minimal

TS = total skor

Selanjutnya untuk mengetahui distribusi penilaian masyarakat terhadap dinas sosial digunakan metode klasifikasi intensitas berdasarkan distribusi, yaitu dengan rumus:

Tabel 1. Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai
Sangat Puas	$I \geq X + SD$
Puas	$X + \frac{1}{2} SD \leq I < X + SD$
Kurang Puas	$X - \frac{1}{2} SD \leq I < X + \frac{1}{2} SD$
Tidak Puas	$X - \frac{1}{2} SD < I \leq X - SD$
Sangat Tidak Puas	$I < X - SD$

Keterangan:

I = Nilai Indikator

X = Rata-Rata

SD = Standar Deviasi

Berdasarkan tabel 1 akan dilakukan penentuan klasifikasi intensitas dengan metode distribusi yang dihitung menggunakan *Microsoft Excel*. Kemudian dilakukan pembuatan tabel interval kepuasan, dan untuk mengetahui *outcome* dilakukan perhitungan terhadap indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui penjumlahan seluruh skor kuesioner yang diberikan responden dan indeks kepuasan skor maksimal. Berikut perhitungan untuk mengetahui pencapaian *outcome*, yaitu dengan rumus:

$$Outcome = \frac{IKM}{IK \text{ maks}} \times 100\%$$

Kemudian hasil perhitungan tersebut digunakan dalam perhitungan efektivitas. Menurut Mahmudi rumus mengukur tingkat efektivitas, yaitu:

$$Efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

Kemudian hasil perhitungan tersebut diklasifikasikan sesuai kriteria penilaian yaitu:

1. Jika persentase nilai lebih besar dari 100 maka akan digolongkan efektif.
2. Jika persentase nilai sama dengan 100 maka akan digolongkan efektif berimbang.
3. Jika persentase nilai kurang dari 100 maka akan digolongkan tidak efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Berikut hasil pengujian validitas pada 123 responden dengan 10 pernyataan untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, yaitu:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

No.	Item Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	Soal 1	0,680	0,2973	Valid
2	Soal 2	0,874	0,2973	Valid
3	Soal 3	0,384	0,2973	Valid
4	Soal 4	0,407	0,2973	Valid
5	Soal 5	0,699	0,2973	Valid
6	Soal 6	0,779	0,2973	Valid
7	Soal 7	0,821	0,2973	Valid
8	Soal 8	0,586	0,2973	Valid
9	Soal 9	0,816	0,2973	Valid
10	Soal 10	0,812	0,2973	Valid

Berdasarkan tabel 2 item pernyataan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dinyatakan valid. Adapun $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} adalah $df = n-2 = 44-2 = 42$ pada taraf signifikan 5%, maka nilai r_{tabel} yaitu 0,2973. Sedangkan r_{hitung} dari hasil *pearson correlation*.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.	Item Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	Soal 1	0,684	0,2973	Valid
2	Soal 2	0,834	0,2973	Valid
3	Soal 3	0,701	0,2973	Valid
4	Soal 4	0,532	0,2973	Valid
5	Soal 5	0,748	0,2973	Valid
6	Soal 6	0,842	0,2973	Valid
7	Soal 7	0,876	0,2973	Valid
8	Soal 8	0,537	0,2973	Valid
9	Soal 9	0,873	0,2973	Valid
10	Soal 10	0,897	0,2973	Valid

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan 1-10 untuk program perlindungan dan jaminan sosial dinyatakan valid. Karena $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana nilai r_{tabel} adalah 0,2973 dan hasil r_{hitung} diambil dari *pearson correlation*.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Program Rehabilitasi Sosial

No.	Item Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	Soal 1	0,786	0,3338	Valid
2	Soal 2	0,850	0,3338	Valid
3	Soal 3	0,561	0,3338	Valid
4	Soal 4	0,352	0,3338	Valid
5	Soal 5	0,906	0,3338	Valid
6	Soal 6	0,889	0,3338	Valid
7	Soal 7	0,909	0,3338	Valid
8	Soal 8	0,398	0,3338	Valid
9	Soal 9	0,886	0,3338	Valid
10	Soal 10	0,845	0,3338	Valid

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk program rehabilitasi sosial dinyatakan valid. Karena $r_{hitung} > r_{tabel}$, adapun nilai r_{tabel} adalah 0,3338 dan nilai r_{hitung} dilihat pada hasil *pearson correlation*.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang menggunakan kuesioner. Berikut hasil pengujian reliabilitas:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas untuk Setiap Program Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	0,880	10	Reliabel
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	0,916	10	Reliabel
3	Program Rehabilitasi Sosial	0,917	10	Reliabel

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa *cronbach's alpha* untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program rehabilitasi sosial $> 0,60$. Sehingga masing-masing pernyataan untuk setiap program Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara dikatakan reliabel.

Value For Money Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada tahun 2020 dan 2021 untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dapat diukur dengan anggaran dan realisasi anggaran berikut:

Tabel 6. Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Program	2020		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Rp 412.404.600	Rp 375.512.600	Rp293.297.200	Rp 275.323.200

Sumber: Diolah dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel 6 maka dapat diketahui pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020 mencapai tingkat nilai ekonomis sebesar 91%, sedangkan tahun 2021 mencapai nilai sebesar 94%. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil pengukuran lebih kecil dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program ini mampu meminimalisir anggaran dan terhindar dari pemborosan.

Pengukuran kinerja keuangan dari segi efisiensi pada tahun 2020-2021 untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dapat diukur dengan capaian kinerja berikut:

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Program	2020			2021		
	Target	Realisasi	Output	Target	Realisasi	Output
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Diolah dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel 7 maka dapat diketahui pengukuran kinerja keuangan dari segi efisiensi program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin pada tahun 2020 mencapai tingkat nilai efisiensi sebesar 110%, sedangkan tahun 2021 mencapai 106%. Adapun kategori persentase pada program ini tahun 2020-2021 tergolong efisiensi, karena hasil persentase melebihi 100%. Maka ini membuktikan bahwa pelaksanaan dari program ini mampu menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan target dan mampu menghemat anggaran.

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin pada penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel. Berdasarkan data tersebut dapat

diketahui tingkat kepuasan publik dengan hasil perhitungan interval senilai 352, indeks kepuasan skor maksimal yaitu 2.200, dan indeks kepuasan skor minimal yaitu 440.

Setelah memperoleh hasil pengukuran interval akan dilakukan pengukuran klasifikasi intensitas dengan metode distribusi yang menghasilkan bahwa 5 responden yang menyatakan bahwa kinerja pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin masuk dalam kategori sangat puas. Kemudian terdapat 13 responden yang menyatakan puas. Selanjutnya terdapat 12 responden yang menyatakan kurang puas. Dan 4 responden yang menyatakan tidak puas. Serta 10 responden yang menyatakan sangat tidak puas. Kemudian dapat diperoleh interval kepuasan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Interval Kepuasan Masyarakat

Interval	Kategori
440-791	Sangat Tidak Puas
792-1.143	Tidak Puas
1.144-1.495	Kurang Puas
1.496-1.847	Puas
1.848-2.200	Sangat Puas

Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari penyebaran kuesioner sesuai jumlah total pernyataan yaitu senilai 1.552, yang berarti berada pada kategori puas. Setelah itu dilakukan perhitungan nilai *outcome* yang mencapai nilai 71%. Sehingga dapat diperoleh nilai efektivitas dari program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin pada tahun 2020-2021, yaitu sama-sama mencapai nilai 71%. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program ini belum mencapai efektivitas yang baik, dikarenakan nilai persentase kurang dari 100%.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada tahun 2020-2021 untuk program perlindungan dan jaminan sosial dapat diukur dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program	2020		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 150.089.500	Rp 143.830.700	Rp 453.369.800	Rp 414.400.800

Sumber: Diolah dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada tahun 2020 untuk program perlindungan dan jaminan sosial menghasilkan nilai 96%, sedangkan tahun 2021 mencapai nilai 91%. Sehingga program ini pada tahun 2020-2021 tergolong ekonomis, karena hasil persentase lebih kecil dari 100%. Hal ini membuktikan program mampu dalam meminimalisir anggaran.

Pengukuran kinerja keuangan dari segi efisiensi pada tahun 2020-2021 untuk program perlindungan dan jaminan sosial dapat diukur dengan capaian kinerja berikut:

Tabel 10. Pencapaian Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program	2020			2021		
	Target	Realisasi	Output	Target	Realisasi	Output
Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	96%	96%	100%	94%	94%

Sumber: Diolah dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel 10 maka dapat diketahui pengukuran efisiensi untuk program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2020 mencapai nilai 100% yang masuk dalam kategori efisiensi berimbang, sehingga program ini menunjukkan bahwa kegiatan berjalan sesuai target, dikarenakan hasil pengukuran yang sama dengan 100%. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai nilai 103% yang masuk dalam kategori efisiensi, karena hasil pengukuran yang lebih besar dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dihasilkan sesuai target.

Hasil uji validitas pada program perlindungan dan jaminan sosial dinyatakan valid dan reliabel. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui hasil perhitungan interval senilai 352, indeks kepuasan skor maksimal yaitu 2.200, dan indeks kepuasan skor minimal yaitu 440.

Kemudian dilakukan pengukuran klasifikasi intensitas dengan metode distribusi yang menghasilkan 4 responden menyatakan kinerja pada program perlindungan dan jaminan sosial masuk dalam kategori sangat puas, 14 responden yang menyatakan puas, 12 responden yang menyatakan kurang puas, 6 responden yang menyatakan tidak puas, dan 8 responden yang menyatakan sangat tidak puas. Sehingga diperoleh interval kepuasan masyarakat, yaitu:

Tabel 11. Interval Kepuasan Masyarakat

Interval	Kategori
440-791	Sangat Tidak Puas
792-1.143	Tidak Puas
1.144-1.495	Kurang Puas
1.496-1.847	Puas
1.848-2.200	Sangat Puas

Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari jumlah total pernyataan, yaitu 1.494, yang masuk dalam kategori kurang puas, maka diperoleh nilai *outcome* yaitu 68%. Sehingga dapat diperoleh nilai efektivitas dari program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020 yaitu 71%, sedangkan tahun 2021 mencapai nilai 72%. Hal ini menunjukkan bahwa program ini pada tahun 2020-2021 tergolong belum efektif dalam mencapai target, karena nilai kurang dari 100%.

Program Rehabilitasi Sosial

Pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada tahun 2020 dan 2021 untuk program rehabilitasi sosial dapat diukur dengan anggaran dan realisasi berikut:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Program Rehabilitasi Sosial

Program	2020		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Rehabilitasi Sosial	Rp 516.230.000	Rp 481.477.200	Rp 200.444.200	Rp 196.701.100

Sumber: Diolah dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel 12 maka dapat diketahui pengukuran dari segi ekonomis pada program rehabilitasi sosial tahun 2020 mencapai nilai 93%, sedangkan pada tahun 2021 mencapai nilai 98%, sehingga program ini pada tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, karena memperoleh nilai kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program ini mampu meminimalisir anggaran dan mampu dalam mengelola anggaran.

Kinerja keuangan dari segi efisiensi pada tahun 2020-2021 untuk program rehabilitasi sosial dapat diukur dengan capaian kinerja berikut:

Tabel 13. Pencapaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

Program	2020			2021		
	Target	Realisasi	Output	Target	Realisasi	Output
Rehabilitasi Sosial	100%	96%	96%	100%	73%	73%

Sumber: Diolah dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Pengukuran dari segi efisiensi pada program rehabilitasi sosial tahun 2020 mencapai tingkat nilai sebesar 103%, sehingga tergolong efisiensi, karena hasil persentase lebih dari 100%. Maka ini membuktikan bahwa program ini menghasilkan kegiatan yang sesuai target. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai nilai 74%, sehingga dikatakan bahwa program ini tergolong belum efisiensi karena hasil persentase kurang dari 100%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan dari program ini belum mampu menghasilkan kegiatan yang sesuai target, meskipun mampu dalam hal menghemat anggaran.

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada program rehabilitasi sosial dinyatakan bahwa kuesioner valid dan reliabel. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui tingkat kepuasan publik dengan hasil perhitungan interval senilai 280, indeks kepuasan skor maksimal yaitu 1.750, dan indeks kepuasan skor minimal yaitu 350.

Setelah itu dilakukan pengukuran klasifikasi intensitas dengan metode distribusi yang menghasilkan 4 responden merasa sangat puas terhadap kinerja pada program rehabilitasi sosial, 4 responden yang menyatakan puas, 17 responden yang menyatakan kurang puas, 3 responden yang menyatakan tidak puas, dan 7 responden yang menyatakan sangat tidak puas. Kemudian dapat diperoleh interval kepuasan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.14 Interval Kepuasan Masyarakat

Interval	Kategori
350-629	Sangat Tidak Puas
630-909	Tidak Puas
910-1.189	Kurang Puas
1.190-1.469	Puas
1.470-1.750	Sangat Puas

Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari penyebaran kuesioner mencapai nilai 1.273, yang berarti tergolong puas. Sehingga diperoleh nilai *outcome* yaitu 73%. Kemudian dilakukan pengukuran efektivitas program rehabilitasi sosial tahun 2020 yang mencapai 76%. Sehingga tergolong belum mencapai efektivitas yang baik, karena hasil pengukuran kurang dari 100%. Sedangkan tahun 2021 memperoleh nilai 100%, sehingga dikatakan pelaksanaan program ini tergolong efektivitas berimbang, karena hasil pengukuran yang sama dengan 100%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan yaitu pengukuran kinerja keuangan dengan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020-2021 memperoleh hasil pengukuran ekonomis di bawah 100%, sehingga tergolong ekonomis. Kemudian untuk pengukuran efisiensi memperoleh hasil lebih dari 100%, sehingga masuk dalam kategori efisiensi. Sedangkan pengukuran efektivitas dinyatakan belum mencapai efektivitas, karena hasil pengukuran yang kurang dari 100%.

Pengukuran kinerja keuangan pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020-2021 memperoleh hasil pengukuran ekonomis di bawah 100%, sehingga masuk dalam kategori ekonomis. Kemudian pada tahun 2020 masuk dalam kategori efisiensi berimbang,

karena hasil pengukuran sama dengan 100%. Dan untuk tahun 2021 pengukuran efisiensi memperoleh hasil lebih dari 100%, sehingga masuk dalam kategori efisiensi. Sedangkan pengukuran efektivitas tahun 2020-2021 dinyatakan belum dapat mencapai efektivitas, karena hasil pengukuran yang kurang dari 100%.

Pengukuran kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara menggunakan konsep *value for money* pada program rehabilitasi sosial tahun 2020-2021 memperoleh hasil pengukuran ekonomis di bawah 100%, sehingga masuk dalam kategori ekonomis. Kemudian untuk pengukuran efisiensi pada tahun 2020 memperoleh hasil lebih dari 100%, sehingga masuk dalam kategori efisiensi. Sedangkan tahun 2021 memperoleh hasil kurang dari 100%, sehingga dikatakan belum efisiensi. Hal ini juga terjadi pada pengukuran efektivitas tahun 2020 yang dinyatakan belum dapat mencapai efektivitas, karena hasil pengukuran yang kurang dari 100%. Namun pada tahun 2021 masuk dalam kategori efektivitas berimbang, karena hasil pengukuran yang sama dengan 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Abdul Hamid dan Ilyas Lamuda, Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money Gorontalo, *Accounting Journal*, Vol. 02, No. 1, April 2019.
- Abdul Nasser Hasibuan, dkk., Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019.
- Abdul Nasser Hasibuan, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Statistik untuk Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Ali Mutasowifin, *Intisari Analisis Kinerja Keuangan*, Bogor: Mahameru Publishing House, 2014.
- Anik Yuesti, dkk., *Akuntansi Sektor Publik*, Bali: CV. Noah Aletheia, 2020.
- Ayu Septiana, Dewi Susilowati, dkk., Standar Pelayanan Minimal, https://www.academia.edu/37796665/STANDAR_PELAYANAN_MINIMAL_SPM_STANDAR_PE_LAYANAN_MINIMAL_SPM_, 17 Oktober 2021.
- Beby Nurtesha Putri, Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Vol. 11, No. 2, November 2019.
- Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS*, Jakarta: Guepedia, Agustus 2021.
- Dwi Purwiyanti, Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi, *e Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 3, Maret 2017.
- Elidawaty Purba, dkk., *Metode Penelitian Ekonomi*, Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis, 2021.

- Erasma Fitalai Zalog dan Progresif Buulolo, Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dengan Pendekatan Value For Money Periode 2018,19 September 2020.
- Fitriani, Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, Banten: Desanta Muliavisitama, 2020.
- Gabriela Thalia wuwungan, dkk., Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Organisasi Sektor Publik di Dinas Kesehatan Kota Manado, *Jurnal Riset Akuntansi*, 14 April 2019.
- Habib Muhsin Syafingi, Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2017.
- Halkadri Fitra, *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, Purwokerto: CV. IRDH, 2019.
- Handoko A. Hasthoro dan Sunardi, Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 1, April 2016.
- Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- <https://setdakab.padanglawaskab.go.id/wp-content/uploads/2016/11/perda-pp-18>, 20 Mei 2022.
- <https://padanglawasutarakab.go.id/read/9/sejarah-padang-lawas-utara>, 20 Mei 2022.
- Isna Ardila dan Ayu Anindya, Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value For Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 15, No. 1, 2015.
- Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, Gowa: Pusaka Almaida, November 2019.
- Jenefer Hermina Worotikan, dkk., Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 4, 2018.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim*, Jakarta Timur: Maktabah Al- Fatih, 2015.
- Laporan Indikator Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021.
- M. Ramadhani, dkk., Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, Maret 2016.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, Cilandak Timur: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13, Pisangan Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Ull Press, Maret 2016.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Marsella Lasut, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Belanja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Sesuai PP No 71 Tahun 2010, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12, No. 2, 2017.
- Martinus Syamsudin, Implementasi Standar Pelayanan Minimal Masyarakat Desa Ujung Kempas Kecamatan Ketungau Hulu, *Fokus*, Vol. 19, No. 1, Maret 2021.

- Meriyatus Sofiani dan Endang Dwi Retnani, Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 11, November 2019.
- Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2019.
- Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ni Ketut Riani, Strategi Peningkatan Pelayanan Publik, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 11, April 2021.
- Nunuy Nur Afiah, dkk., *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Entitas Akuntansi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurhamida, Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, 5 Desember 2021.
- Nur Zeni Amilia Putri, Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Ongku Bangsawan, Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, 6 Desember 2021.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Analisis atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, <https://peraturanpedia.id/permenpan-rb-nomor-53-tahun-2014/>, 8 Maret 2022.
- Putri Ariella Belinda dan Nevi Costari, Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintahan, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Rahmat Tantowi, Standar Pelayanan Minimal Sebagai Strategi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*, Ponorogo: CV. Wade Group, 2016.
- Rusdiani dan Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Penelitian, Bandung: Pusat Penelitian dan UIN SGD Bandung, Agustus 2018.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, Maret 2012.
- Surajiyo, dkk., *Penelitian Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Teresia Atikapuspa Wardhani, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Value For Money, *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017.
- Tiarona, Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, 5 Desember 2021.
- Triniyati, Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dengan Pendekatan *Value For Money* Periode Tahun 2015-2017, *Skripsi*, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pemerintah Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>, 7 Maret 2022.
- Yosie Dwinanda, Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018.

Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*, Bandung: Pustaka Setia, Februari 2016.